TERKAIT LAYANAN PENDIDIKAN, OMBUDSMAN SULBAR SIDAK KE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MAMASA

Selasa, 26 Juli 2022 - Amirullah B.

MAMASA - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) layanan pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Selasa (26/07/2022).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, Lukman Umar mengatakan sidak dilakukan sebagai bentuk hadirnya Ombudsman RI atas pelayanan publik. Lukman juga menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi dan sempat viral, yakni tulisan dua orang siswa yang berbunyi "Pak Presiden Jokowi, kami jarang sekolah karena bapak guru jarang datang ke sekolah, kami membutuhkan pendidikan yang layak, kami membutuhkan guru yang selalu datang ke sekolah," yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Keluhan seperti ini harus menjadi perhatian khusus, utamanya bagi Dinas Pendidikan Mamasa.Â Kami yakin hal tersebut masih banyak terjadi di sekolah lain yang jauh dari jangkauan pengawasan, sehingga diharapkan dapat segera berbenah dan ditindak lanjuti," jelas Lukman.

Selain itu Lukman juga memberikan saran dan masukan bagi seluruh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Pendidkan terkait perbaikan layanan pendidikan ke depan, meskipun dengan berbagai kekurangan yang ada saat ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mamasa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rusli membenarkan atas berita yang viral terkait Pendidikan di Mamasa.

"Berita yang sedang viral itu benar dari salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Mamasa ini. Kami juga sangat menyayangkan atas kejadian tersebut meskipun ada beberapa hal objektif yang perlu diluruskan," ucap Rusli.

Pihaknya juga menyampaikan beberapa keluhan-keluhan yang dialami oleh para guru yang mengajar di daerah terpencil.

"Masih banyak keluhan terkait akses jalan ke sekolah-sekolah terpencil yang begitu sulit, sehingga menyebabkan layanan pendidikan belum maksimal.Â Dari 262 Sekolah Dasar, 2 Sekolah Luar Biasa Negeri, 297 Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta, serta 100 Sekolah Menegah Pertama Negeri dan Swasta hanya memiliki sedikit pengawas sekolah," tambahnya.